

Tim BPK Sumut Periksa APBD Humbahas

Doloksanggul (SIB)

Secara mendadak, Tim BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Sumut turun ke Humbang Hasundutan (Humbahas) dalam rangkaian pemeriksaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2011. Tim BPK langsung melakukan pertemuan dengan seluruh SKPD (satuan kerja kepala daerah) Humbahas, di Aula Hutamas, Doloksanggul, Senin (19/3).

Kabag Humas Pemkab Humbahas Hotman Hutasoit ketika diwawancarai wartawan di kantornya membenarkan adanya pertemuan dengan tim BPK tersebut. "Pertemuan pendahuluan tadi dengan tim BPK perwakilan Sumut ke Kabupaten Humbahas, adalah untuk memeriksa APBD Humbahas Tahun Anggaran 2011," ujar Hotman.

Hotman menjelaskan, sekretaris daerah langsung memerintahkan seluruh bendahara dan pimpinan SKPD untuk mendengarkan arahan dari ketua tim BPK agar setiap SKPD mempersiapkan berkas-berkas dan dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan APBD Tahun

Anggaran 2011 tersebut. "Sekda Humbahas Martuaman Silalahi SH langsung memerintahkan seluruh bendahara dan pimpinan SKPD untuk mendengarkan arahan dari ketua tim BPK agar setiap SKPD mempersiapkan berkas-berkas dan dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan APBD tahun 2011", ungkapnya.

Diutarakannya, tim BPK berjumlah kurang lebih 5 orang yang diketuai J Sihombing, akan bekerja selama 4 hari untuk pendahuluan. "Kemudian 11 hari menindaklanjuti dan untuk 30 hari pemeriksaan secara keseluruhan. Sehingga nantinya mereka akan merekomendasikan hasil pemeriksaan ke BPK pusat," beber Hotman.

Hotman mengaku, kedatangan tim BPK Sumut ke Humbahas hanya memberikan arahan agar setiap SKPD menyikapi dan melengkapi berkas yang diperlukan, yakni sebanyak 19 item. Yaitu dokumen APBD tahun 2011, penjabaran APBD dan PAPBD Tahun 2011. Hasil evaluasi Gubernur Sumut tentang APBD dan PAPBD tahun 2011, Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan

daerah, Keputusan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah, Juknis dan surat edaran kepala daerah tentang pelaksanaan belanja daerah tahun 2011, Perda tentang struktur organisasi perangkat daerah.

Kaputusan kepala daerah tentang pengangkatan BUD (bendahara umum daerah)/kuasa BUD, Keputusan kepala daerah tentang pengangkatan bendaharawan dan bendahara penerimaan, Buku kas, Benda pengeluaran SKPD per 1 Januari – 1 Januari 2012, rekening koran dan deposito, permohonan pembukaan giro, register SP2D, register SPP, SPM, laporan bendahara pengeluaran masing-masing SKPD, laporan pengesahan pertanggungjawaban bendahara penerimaan masing-masing SKPD, daftar sisa kas dan slip setoran UYHD (uang yang wajib harus disetor) masing-masing SKPD. "Tim BPK hanya memberikan arahan agar semua SKPD menyikapi dan melengkapi berkas yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut yang berjumlah 19 item", katanya. (FBI/c)